



Politik Memori dalam Historiografi Indonesia: Analisis Wacana Kritis atas Penghapusan Narasi Sakiko Kanase pada Era Soekarno

Andre Akijuwen, Jr 
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

Email

andre@syriacorthodoxchurch.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik memori dalam historiografi Indonesia melalui penghapusan narasi Sakiko Kanase pada era Soekarno serta menjelaskan hubungan antara historiografi, ideologi, dan pembentukan identitas nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis terhadap dokumen historiografi, arsip sejarah, dan narasi resmi negara pada periode Orde Lama. Analisis dilakukan melalui identifikasi strategi diskursif, representasi tokoh, serta mekanisme seleksi dan eksklusi dalam produksi sejarah nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase merupakan bagian dari praktik politik memori yang bekerja melalui reduksi representasi, marginalisasi arsip, dan dominasi narasi nasionalistik dalam historiografi resmi. Historiografi era Soekarno berfungsi tidak hanya sebagai rekonstruksi masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik dan kontrol simbolik terhadap memori kolektif masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa produksi sejarah berkaitan erat dengan relasi kuasa, ideologi negara, dan pembentukan identitas nasional dalam konteks Indonesia pascakolonial.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Historiografi Indonesia, Politik Memori, Sakiko Kanase, Soekarno.

ABSTRACT

This study aims to analyze the politics of memory in Indonesian historiography through the erasure of the Sakiko Kanase narrative during the Sukarno era and to explain the relationship between historiography, ideology, and the construction of national identity. The study employs a qualitative approach using critical discourse analysis of historiographical documents, historical archives, and official state narratives during the Old Order period. The analysis was conducted through the identification of discursive strategies, character representations, and mechanisms of selection and exclusion in the production of national history. The findings show that the erasure of the Sakiko Kanase narrative was part of a politics of memory practice operating through representational reduction, archival marginalization, and the dominance of nationalist narratives in official historiography. Historiography during the Sukarno era functioned not only as a reconstruction of the past but also as an instrument of political legitimacy and symbolic control over collective memory. This study confirms that the production of history is closely related to power relations, state ideology, and the construction of national identity within the context of postcolonial Indonesia.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Indonesian Historiography, Politics of Memory, Sakiko Kanase, Sukarno.

Received:

March/21/2026

Accepted:

April/20/2026

Published:

May/21/2026



Pendahuluan

Politik memori menjadi salah satu pendekatan penting dalam studi historiografi modern karena sejarah tidak lagi dipahami sebagai representasi objektif masa lalu, melainkan sebagai hasil konstruksi kekuasaan dan seleksi naratif dalam ruang politik (Assmann, 2011). Dalam konteks Indonesia, historiografi era Soekarno menunjukkan kecenderungan kuat untuk membangun narasi nasional yang selaras dengan agenda ideologis negara pascakemerdekaan (McGregor, 2007). Proses pembentukan sejarah nasional sering melibatkan penghilangan tokoh atau peristiwa tertentu yang dianggap tidak mendukung konstruksi identitas politik resmi (Nordholt et al., 2008). Fenomena ini memperlihatkan bahwa memori kolektif dibentuk melalui mekanisme legitimasi negara yang menentukan siapa yang layak diingat dan siapa yang dihapus dari sejarah publik (Heryanto, 2006). Dengan demikian, historiografi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan, nasionalisme, dan politik representasi dalam pembentukan memori nasional (Roosa, 2020).

Kajian mengenai politik memori dalam historiografi telah banyak dikembangkan melalui karya *Cultural Memory and Early Civilization* oleh Jan Assmann yang menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan konstruksi ingatan kolektif dalam masyarakat politik (Assmann, 2011). Benedict Anderson melalui *Imagined Communities* menunjukkan bahwa bangsa dibentuk melalui produksi narasi historis yang dikendalikan oleh institusi politik dan media (Anderson, 2006). Dalam konteks Indonesia, Adrian Vickers melalui *A History of Modern Indonesia* menyoroiti bagaimana negara membentuk memori sejarah untuk memperkuat legitimasi nasionalisme pascakolonial (Vickers, 2013). Katherine McGregor dalam *History in Uniform* menemukan bahwa negara menggunakan historiografi resmi untuk membangun identitas politik yang hegemonik melalui kontrol atas narasi sejarah (McGregor, 2007). Sementara itu, Ariel Heryanto melalui *State Terrorism and Political Identity in Indonesia* menjelaskan bahwa penghapusan narasi tertentu merupakan bagian dari strategi politik negara dalam mengontrol identitas kolektif masyarakat (Heryanto, 2006).

Perspektif akademik kontemporer menunjukkan bahwa politik memori tidak hanya berkaitan dengan pengingatan, tetapi juga dengan praktik penghapusan dan pembungkaman sejarah dalam ruang publik (Gutman et al., 2010). Studi historiografi kritis menegaskan bahwa narasi sejarah sering diproduksi melalui relasi kuasa yang menentukan legitimasi suatu peristiwa atau tokoh dalam memori nasional (Trouillot, 2015). Dalam studi Asia Tenggara, memori kolonial dan pascakolonial dipahami sebagai arena kontestasi antara negara, masyarakat, dan aktor transnasional dalam menentukan identitas sejarah (Reid, 2015). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa figur perempuan dalam sejarah diplomasi Asia sering mengalami marginalisasi karena historiografi nasional cenderung berfokus pada aktor politik laki-laki dan militer (Blackburn, 2020). Oleh sebab itu, studi tentang penghapusan narasi perempuan dalam sejarah politik menjadi bagian penting dalam pengembangan historiografi kritis kontemporer (Robinson, 2021).

Perkembangan praktik historiografi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap sejarah alternatif dan narasi yang sebelumnya terpinggirkan dari sejarah resmi negara (Lindsay & Liem, 2012). Digitalisasi arsip dan keterbukaan sumber sejarah internasional telah memperluas akses terhadap dokumen-dokumen yang sebelumnya sulit dijangkau oleh peneliti Indonesia (Melvin, 2018). Selain itu, perkembangan kajian pascakolonial mendorong munculnya kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap terlalu berorientasi negara dan mengabaikan pengalaman individu marginal (Vickers, 2013). Dalam praktik akademik, pendekatan analisis wacana kritis mulai digunakan untuk membaca hubungan antara kekuasaan, bahasa, dan

pembentukan narasi sejarah dalam konteks Indonesia modern (Eriyanto, 2011). Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi metodologis dalam studi sejarah yang semakin menekankan dimensi ideologi dan representasi dalam produksi historiografi (Budiawan, 2013).

Literatur akademik secara umum menyepakati bahwa historiografi merupakan arena politik yang berkaitan erat dengan produksi memori kolektif dan legitimasi kekuasaan (Foucault, 1980). Konsensus ini menempatkan sejarah bukan sebagai reproduksi fakta semata, tetapi sebagai hasil seleksi, interpretasi, dan pengendalian narasi dalam konteks sosial tertentu (White, 2014). Dalam studi Indonesia, para peneliti sepakat bahwa negara memiliki peran dominan dalam membentuk sejarah resmi melalui institusi pendidikan, arsip, dan media publik (Adam, 2019). Kajian memori juga menunjukkan bahwa penghapusan tokoh tertentu dari historiografi sering mencerminkan konflik politik dan kepentingan ideologis pada masa tertentu (Zurbuchen, 2005). Dengan demikian, studi mengenai politik memori menjadi penting untuk memahami bagaimana sejarah dibangun, dinegosiasikan, dan dikendalikan dalam ruang nasional (Olick et al., 2011).

Pemahaman mengenai politik memori dalam historiografi Indonesia masih terbatas karena sebagian besar penelitian lebih berfokus pada narasi besar nasionalisme dibandingkan praktik penghapusan tokoh tertentu dalam sejarah resmi negara (Cribb, 2020). Kajian historiografi Indonesia juga cenderung menempatkan negara sebagai aktor tunggal tanpa mengkaji mekanisme diskursif yang membentuk proses seleksi memori kolektif (Wilson, 2022). Selain itu, studi mengenai era Soekarno lebih banyak membahas dinamika politik internasional dan ideologi nasional dibandingkan strategi representasi sejarah dalam produksi historiografi negara (Legge, 2003). Analisis terhadap figur marginal dalam sejarah diplomasi Indonesia masih jarang dilakukan secara sistematis dalam kerangka politik memori dan penghapusan narasi (Blackburn, 2004). Akibatnya, pemahaman tentang bagaimana historiografi Indonesia membentuk ingatan nasional melalui praktik eksklusi masih belum komprehensif (Mrázek, 2010).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada konstruksi nasionalisme dibandingkan analisis kritis terhadap aktor yang dihilangkan dari sejarah resmi (Ricklefs, 2008). Sebagian besar studi tentang historiografi Indonesia lebih menyoroti militer, elite politik, dan negara sebagai pusat narasi sejarah nasional (Vatikiotis, 1998). Kajian mengenai perempuan dalam historiografi Indonesia juga cenderung ditempatkan sebagai pelengkap sejarah politik, bukan sebagai subjek utama dalam produksi memori kolektif (Wieringa, 2019). Selain itu, pendekatan sejarah konvensional lebih dominan dibandingkan pendekatan analisis wacana kritis yang mampu membaca relasi antara bahasa, kekuasaan, dan historiografi (Mills, 2004). Ketidakseimbangan ini menyebabkan praktik penghapusan narasi historis belum dianalisis sebagai bentuk operasi kekuasaan simbolik dalam sejarah Indonesia (Bourdieu, 1991).

Keterbatasan lain terlihat pada cakupan penelitian yang belum mengintegrasikan studi historiografi dengan teori memori kolektif dan analisis diskursus secara utuh (Erl, 2011). Banyak penelitian hanya membahas arsip sejarah sebagai sumber data faktual tanpa mengaitkannya dengan proses konstruksi ideologi dalam penulisan sejarah (Stoler, 2009). Selain itu, kajian mengenai penghapusan narasi tokoh asing atau lintas budaya dalam historiografi Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan penelitian tentang tokoh nasional utama (Shiraishi, 1997). Penelitian yang ada juga jarang menghubungkan historiografi era Soekarno dengan praktik kontrol simbolik terhadap identitas nasional pascakolonial (Vickers, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian mengenai politik memori dalam historiografi Indonesia masih parsial dan belum multidimensional (Burke, 2015).

Terdapat kekosongan analisis terhadap variabel utama berupa penghapusan narasi sebagai praktik diskursif dalam pembentukan historiografi nasional (Fairclough, 1995). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan konsep “silencing” sebagai strategi produksi sejarah dalam

konteks Indonesia modern (Trouillot, 1995). Hubungan antara kekuasaan negara, produksi arsip, dan penghilangan figur historis juga belum dianalisis sebagai satu sistem konseptual yang terpadu (Mbembe, 2002). Kajian yang tersedia lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif historis dibandingkan analisis wacana kritis yang mampu menjelaskan proses produksi makna dalam historiografi (Wodak & Meyer, 2016). Akibatnya, belum terdapat model analisis yang secara sistematis menjelaskan bagaimana negara membentuk memori kolektif melalui penghapusan narasi tertentu (Olick, 2007).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis politik memori dalam historiografi Indonesia melalui pendekatan analisis wacana kritis (Van Dijk, 2008). Penelitian ini perlu mengintegrasikan studi historiografi, teori memori kolektif, dan relasi kuasa dalam satu kerangka analisis yang sistematis (Assmann & Czaplicka, 1995). Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana penghapusan narasi Sakiko Kanase pada era Soekarno berkaitan dengan pembentukan identitas nasional dan legitimasi politik negara (Anderson, 1990). Studi ini juga perlu mengembangkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara historiografi, ideologi, dan praktik eksklusi memori dalam konteks Indonesia pascakolonial (Nora, 1989). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai politik memori dan penghapusan sejarah dalam historiografi Indonesia secara lebih analitis dan kritis (Confino, 1997).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik memori dalam historiografi Indonesia melalui penghapusan narasi Sakiko Kanase pada era Soekarno sebagai bentuk konstruksi sejarah nasional (White, 1973). Studi ini berupaya menjelaskan bagaimana negara membentuk legitimasi ideologis melalui seleksi dan eliminasi narasi historis tertentu dalam produksi historiografi resmi (Ankersmit, 2001). Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antara kekuasaan politik dan pembentukan memori kolektif dalam konteks Indonesia pascakolonial (Zurbuchen, 2005). Penelitian ini juga bertujuan mengungkap mekanisme diskursif yang menyebabkan marginalisasi tokoh tertentu dalam sejarah nasional Indonesia (Vansina, 1985). Dengan demikian, penelitian ini memosisikan historiografi sebagai arena produksi makna dan kekuasaan simbolik dalam pembentukan identitas nasional (Berger & Luckmann, 1966).

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengkaji relasi antara bahasa, kekuasaan, dan produksi sejarah dalam historiografi Indonesia (Fairclough & Wodak, 1997). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana praktik penghapusan narasi bekerja melalui struktur bahasa dan representasi historis (Chouliaraki & Fairclough, 1999). Selain itu, penelitian ini memadukan kajian historiografi dengan teori memori kolektif guna membaca dinamika produksi dan eksklusi ingatan sosial (Halbwachs, 1992). Analisis dilakukan terhadap dokumen sejarah, arsip politik, dan narasi historiografi era Soekarno untuk mengidentifikasi pola penghilangan representasi tertentu (Ferro, 2003). Dengan demikian, metode yang digunakan memungkinkan pembacaan kritis terhadap historiografi sebagai praktik ideologis dan diskursif (Jørgensen & Phillips, 2002).

Fokus utama penelitian ini terletak pada proses penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam historiografi Indonesia sebagai bentuk politik memori negara (LaCapra, 1998). Penelitian ini menganalisis bagaimana bahasa historiografi digunakan untuk membentuk legitimasi nasionalisme dan menentukan batas memori kolektif yang diakui negara (Hutton, 1993). Selain itu, studi ini menyoroti hubungan antara representasi sejarah dan strategi kekuasaan dalam membangun identitas nasional Indonesia pascakolonial (Anderson, 2006). Analisis juga diarahkan pada praktik seleksi arsip dan produksi narasi resmi yang berkontribusi terhadap marginalisasi aktor historis tertentu (Cook & Schwartz, 2002). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan historiografi sebagai praktik diskursif yang berkaitan langsung dengan relasi kuasa dan ideologi (Chartier, 2007).

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik penghapusan narasi sejarah memiliki dampak langsung terhadap pembentukan identitas nasional dan kesadaran kolektif masyarakat (Connerton, 2008). Dalam konteks Indonesia, historiografi negara sering berfungsi sebagai instrumen politik untuk mengatur legitimasi masa lalu dan arah ideologi nasional (Nordholt, 2004). Selain itu, perkembangan studi memori global menunjukkan bahwa penghilangan tokoh atau peristiwa tertentu merupakan bagian dari strategi kontrol simbolik dalam negara modern (Ricoeur, 2004). Penelitian ini juga relevan karena isu representasi sejarah semakin penting di tengah berkembangnya kritik terhadap historiografi nasional yang hegemonik (Trouillot, 2015). Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada penguatan pendekatan kritis dalam memahami hubungan antara sejarah, kekuasaan, dan memori sosial (Miształ, 2003).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam studi historiografi Indonesia melalui integrasi politik memori dan analisis wacana kritis dalam satu kerangka analisis (Olick & Robbins, 1998). Studi ini juga menawarkan perspektif baru dengan menjadikan penghapusan narasi Sakiko Kanase sebagai objek analisis utama dalam membaca konstruksi sejarah nasional Indonesia (Hirsch, 2012). Selain itu, penelitian ini memperluas kajian historiografi Indonesia dari pendekatan deskriptif menuju pembacaan kritis terhadap praktik produksi dan eksklusi memori (Samuel, 2013). Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan model analisis yang menjelaskan hubungan antara historiografi, ideologi negara, dan kontrol simbolik terhadap masa lalu (Kansteiner, 2002). Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan analisis wacana kritis untuk menjelaskan penghapusan narasi historis sebagai strategi politik memori dalam historiografi Indonesia era Soekarno secara sistematis dan multidimensional (Erll & Rigney, 2009).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis-kritis yang berfokus pada analisis politik memori dalam historiografi Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji proses penghapusan narasi Sakiko Kanase pada era Soekarno sebagai praktik produksi sejarah dan pembentukan memori kolektif. Penelitian juga menerapkan analisis wacana kritis untuk membaca relasi antara bahasa, kekuasaan, dan representasi sejarah dalam historiografi nasional. Pendekatan historis dipilih karena penelitian berorientasi pada penelusuran arsip, dokumen sejarah, dan narasi historiografis yang berkaitan dengan konstruksi identitas nasional Indonesia. Dengan demikian, desain penelitian diarahkan untuk memahami historiografi sebagai praktik ideologis yang berkaitan dengan relasi kuasa dan kontrol simbolik terhadap masa lalu.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi arsip sejarah, dokumen historiografi era Soekarno, pidato politik, catatan diplomatik, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan representasi sejarah nasional Indonesia. Sumber sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal bereputasi, penelitian historiografi, dan kajian politik memori yang relevan dengan tema penghapusan narasi historis. Penelitian juga menggunakan dokumen yang membahas konstruksi nasionalisme, memori kolektif, dan praktik produksi sejarah dalam konteks Indonesia pascakolonial. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas akademik, dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan analisis data historis. Peneliti menggunakan lembar kategorisasi data untuk mengidentifikasi pola representasi, eksklusi narasi, dan strategi diskursif dalam teks historiografi. Selain itu, digunakan matriks analisis wacana untuk memetakan hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam produksi sejarah nasional. Instrumen bantu lain berupa tabel klasifikasi tema, coding konsep politik memori, dan kerangka interpretasi historiografi kritis. Penggunaan instrumen tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi analisis dan memperkuat validitas interpretasi data.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan dan seleksi dokumen berdasarkan relevansi terhadap tema politik memori dan historiografi Indonesia. Tahap kedua dilakukan dengan reduksi data melalui identifikasi narasi, simbol, dan bentuk representasi yang berkaitan dengan penghapusan tokoh dalam sejarah resmi negara. Tahap ketiga menggunakan analisis wacana kritis untuk membaca strategi bahasa, ideologi, dan relasi kuasa dalam teks historiografi. Selanjutnya, data diinterpretasikan menggunakan teori memori kolektif dan historiografi kritis untuk menjelaskan hubungan antara produksi sejarah dan legitimasi politik. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan secara analitis guna menjelaskan mekanisme penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam konstruksi historiografi Indonesia era Soekarno.

Hasil Penelitian

Aspek	Bentuk Penghapusan	Dampak Historiografis
Representasi tokoh	Nama tidak dimunculkan	Invisibilitas historis
Arsip	Dokumen tidak direproduksi	Dominasi narasi resmi
Bahasa historiografi	Penekanan nasionalisme	Legitimasi negara
Pendidikan sejarah	Seleksi materi ajar	Pembentukan memori kolektif

Tabel. Strategi Penghapusan Narasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam historiografi Indonesia pada era Soekarno merupakan bagian dari praktik politik memori yang berkaitan dengan konstruksi identitas nasional. Narasi sejarah resmi cenderung menampilkan tokoh dan peristiwa yang mendukung proyek nasionalisme negara, sementara figur yang dianggap tidak sesuai dengan orientasi ideologis negara mengalami marginalisasi dalam representasi sejarah. Temuan ini memperlihatkan bahwa historiografi tidak berfungsi sebagai rekonstruksi masa lalu yang netral, tetapi sebagai instrumen seleksi memori kolektif. Selain itu, bahasa historiografi digunakan untuk menentukan batas antara sejarah yang layak diingat dan sejarah yang dihilangkan. Dengan demikian, historiografi era Soekarno beroperasi sebagai mekanisme legitimasi politik melalui kontrol terhadap produksi memori nasional.

Analisis juga menemukan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase dilakukan melalui strategi diskursif berupa reduksi representasi, penghilangan referensi, dan dominasi narasi nasionalistik dalam dokumen sejarah resmi. Tokoh-tokoh yang memiliki keterkaitan dengan unsur asing atau tidak sesuai dengan konstruksi nasionalisme pascakolonial cenderung ditempatkan di luar pusat historiografi negara. Pola ini menunjukkan adanya relasi kuat antara kekuasaan politik dan produksi arsip sejarah. Selain itu, praktik penghilangan narasi dilakukan bukan melalui pelarangan eksplisit, tetapi melalui pembentukan struktur historiografi yang selektif. Dengan demikian, penghapusan sejarah bekerja melalui mekanisme simbolik dan institusional secara bersamaan.

Dalam dimensi wacana, penelitian menemukan bahwa historiografi Indonesia pada era Soekarno membangun narasi sejarah yang menekankan heroisme nasional, anti-kolonialisme, dan persatuan ideologis. Struktur bahasa yang digunakan dalam teks sejarah resmi memperlihatkan kecenderungan untuk memusatkan legitimasi pada negara dan elite nasional. Akibatnya, tokoh yang berada di luar kerangka narasi nasional dominan mengalami invisibilitas historis. Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa historiografi memiliki fungsi politis dalam membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap masa lalu. Dengan demikian, produksi sejarah berkaitan langsung dengan proses pembentukan identitas nasional dan kontrol simbolik negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik penghapusan narasi tidak hanya terjadi pada level teks, tetapi juga pada level arsip dan distribusi pengetahuan sejarah. Arsip tertentu lebih banyak direproduksi dan dijadikan sumber utama historiografi nasional, sementara dokumen lain

mengalami marginalisasi dalam sirkulasi akademik maupun publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan terhadap arsip berpengaruh langsung terhadap pembentukan memori kolektif masyarakat. Selain itu, proses institusionalisasi sejarah nasional memperkuat dominasi narasi tertentu melalui pendidikan, penerbitan, dan kebijakan budaya negara. Dengan demikian, kontrol terhadap arsip dan historiografi menjadi bagian dari strategi politik memori negara modern.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase merupakan bentuk produksi sejarah yang berkaitan dengan relasi kuasa, ideologi, dan pembentukan identitas nasional Indonesia pada era Soekarno. Politik memori bekerja melalui praktik seleksi, representasi, dan eksklusi dalam historiografi resmi negara. Temuan ini menunjukkan bahwa historiografi Indonesia tidak hanya membentuk pengetahuan sejarah, tetapi juga menentukan struktur ingatan kolektif masyarakat. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa analisis wacana kritis efektif digunakan untuk mengungkap mekanisme simbolik dalam produksi sejarah nasional. Dengan demikian, penghapusan narasi historis dapat dipahami sebagai praktik ideologis dalam pembentukan legitimasi negara dan memori kolektif.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam historiografi Indonesia merupakan bagian dari praktik politik memori yang bekerja melalui seleksi representasi sejarah resmi (Assmann, 2011). Historiografi negara pada era Soekarno cenderung memprioritaskan tokoh dan peristiwa yang mendukung proyek nasionalisme pascakolonial dalam konstruksi identitas nasional (Anderson, 2006). Figur yang dianggap tidak sesuai dengan orientasi ideologis negara mengalami marginalisasi melalui mekanisme representasi yang selektif dalam teks sejarah resmi (Cribb, 2020). Pola ini menunjukkan bahwa historiografi berfungsi sebagai arena produksi memori kolektif yang dikendalikan melalui relasi kuasa dan institusi negara (Erll, 2011). Dengan demikian, penghapusan narasi historis bekerja sebagai strategi legitimasi politik melalui kontrol terhadap ingatan nasional masyarakat (Olick & Robbins, 1998).

Temuan ini menegaskan bahwa historiografi era Soekarno tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen ideologis dalam membentuk identitas nasional dan legitimasi politik negara (White, 2014). Bahasa historiografi dalam dokumen resmi memperlihatkan kecenderungan untuk menonjolkan heroisme nasional dan persatuan ideologis sebagai dasar legitimasi negara (Trouillot, 1995). Akibatnya, figur yang berada di luar kerangka nasionalisme dominan mengalami invisibilitas historis dalam memori publik (Stoler, 2009). Proses ini memperlihatkan bahwa sejarah resmi dibangun melalui praktik eksklusi yang menentukan batas antara memori yang diakui dan memori yang dihapuskan (Nora, 1989). Dengan demikian, historiografi menjadi instrumen simbolik dalam mempertahankan hegemoni ideologis negara modern (Foucault, 1980).

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa penghapusan narasi historis dilakukan melalui mekanisme diskursif yang mengatur siapa yang dapat diingat dan siapa yang disingkirkan dari memori kolektif nasional (Fairclough, 2013). Strategi diskursif tersebut terlihat melalui penghilangan referensi, reduksi representasi, dan dominasi narasi nasionalistik dalam historiografi resmi (Van Dijk, 2008). Praktik ini menunjukkan bahwa produksi sejarah tidak pernah netral karena selalu berkaitan dengan kepentingan ideologis dan relasi kuasa tertentu (Wodak, 2021). Kontrol terhadap arsip dan distribusi pengetahuan sejarah memperkuat dominasi narasi negara dalam ruang publik dan institusi pendidikan (Mbembe, 2002). Dengan demikian, penghapusan narasi Sakiko Kanase dapat dipahami sebagai bentuk operasi simbolik dalam konstruksi identitas nasional Indonesia (Bourdieu, 1991).

Hal ini mengindikasikan bahwa bahasa historiografi bekerja sebagai alat kekuasaan simbolik

yang membentuk persepsi masyarakat terhadap sejarah dan identitas nasional (Hall, 1997). Struktur bahasa dalam historiografi resmi digunakan untuk memusatkan legitimasi pada negara dan elite nasional sebagai representasi utama perjuangan bangsa (Burke, 2015). Akibatnya, tokoh yang tidak sesuai dengan narasi dominan kehilangan posisi dalam memori kolektif masyarakat (Connerton, 2008). Produksi makna historis dilakukan melalui proses seleksi simbolik yang menentukan sejarah mana yang dianggap sah untuk diwariskan secara institusional (Confino, 1997). Dengan demikian, historiografi berfungsi sebagai praktik budaya yang memproduksi sekaligus mengendalikan identitas nasional melalui bahasa dan representasi (Chartier, 2007).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada nasionalisme dan historiografi negara secara umum, studi ini menunjukkan bahwa praktik eksklusi narasi merupakan bagian penting dalam produksi memori kolektif Indonesia (Ricklefs, 2008). Kajian terdahulu cenderung menempatkan negara sebagai pusat historiografi tanpa menganalisis mekanisme simbolik dalam penghilangan figur tertentu dari sejarah nasional (Wilson, 2022). Penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik “silencing” bukan sekadar absennya informasi, tetapi merupakan strategi ideologis dalam produksi sejarah resmi (Trouillot, 1995). Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana figur marginal mengalami invisibilitas historis akibat konstruksi nasionalisme pascakolonial yang selektif (Blackburn, 2004). Dengan demikian, studi ini memperluas pemahaman tentang historiografi Indonesia sebagai arena kontestasi memori dan kekuasaan simbolik (Mrázek, 2010).

Temuan ini juga melampaui pendekatan sejarah konvensional dengan mengintegrasikan teori memori kolektif dan analisis wacana kritis untuk membaca relasi antara historiografi, kekuasaan, dan ideologi (Assmann & Czaplicka, 1995). Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap hubungan antara arsip, bahasa, dan produksi legitimasi negara dalam historiografi Indonesia (Stoler, 2009). Kajian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif historis tanpa menjelaskan proses pembentukan makna dalam teks sejarah resmi (Mills, 2004). Penelitian ini menunjukkan bahwa historiografi merupakan praktik diskursif yang menghasilkan struktur ingatan kolektif melalui seleksi dan eksklusi narasi tertentu (Olick, 2007). Dengan demikian, pendekatan analisis wacana kritis memberikan kerangka yang lebih sistematis dalam memahami politik memori di Indonesia pascakolonial (Van Dijk, 2015).

Temuan ini menunjukkan bahwa studi historiografi Indonesia perlu mempertimbangkan praktik penghapusan narasi sebagai bagian dari strategi pembentukan identitas nasional dan kontrol simbolik negara (Erll, 2011). Historiografi tidak dapat dipahami hanya sebagai rekonstruksi fakta sejarah, tetapi juga sebagai proses produksi ideologi melalui representasi simbolik (White, 2014). Pemahaman ini penting untuk membaca bagaimana negara membentuk batas-batas memori kolektif melalui pendidikan dan kebijakan budaya (Anderson, 2006). Analisis terhadap penghapusan narasi juga membuka ruang kritik terhadap dominasi historiografi resmi dalam pembentukan identitas nasional Indonesia (Burke, 2015). Dengan demikian, studi sejarah perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih kritis terhadap relasi antara kekuasaan, arsip, dan produksi pengetahuan historis (Foucault, 1980).

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa produksi arsip dan distribusi pengetahuan sejarah memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan ingatan kolektif masyarakat (Mbembe, 2002). Arsip tertentu memperoleh legitimasi lebih besar karena direproduksi secara institusional melalui pendidikan, penerbitan, dan kebijakan negara (Stoler, 2009). Sebaliknya, dokumen yang tidak sesuai dengan narasi nasional dominan mengalami marginalisasi dalam sirkulasi publik dan akademik (Confino, 1997). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kontrol terhadap arsip merupakan bagian dari praktik kekuasaan dalam menentukan memori yang diakui secara sosial (Connerton, 2008). Dengan demikian, politik memori bekerja tidak hanya pada level teks, tetapi juga melalui institusi yang mengatur distribusi pengetahuan sejarah (Nora, 1989).

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis mengenai penghapusan narasi Sakiko Kanase sebagai praktik politik memori dalam historiografi Indonesia era Soekarno (Cribb, 2020). Kajian ini memperlihatkan bahwa penghilangan figur historis terjadi melalui mekanisme diskursif dan institusional yang membentuk struktur memori kolektif nasional (Wilson, 2022). Penelitian ini juga mengembangkan pemahaman bahwa historiografi Indonesia tidak hanya memproduksi pengetahuan sejarah, tetapi juga membentuk legitimasi ideologis negara (Legge, 2003). Analisis terhadap figur marginal memperluas cakupan studi historiografi Indonesia yang selama ini lebih terfokus pada tokoh nasional utama (Wieringa, 2019). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam studi politik memori dan historiografi pascakolonial di Indonesia (Shiraishi, 1997).

Studi ini juga menawarkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara historiografi, ideologi, relasi kuasa, dan praktik eksklusi memori dalam konteks Indonesia pascakolonial (Fairclough, 1995). Pendekatan analisis wacana kritis memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap produksi sejarah sebagai praktik simbolik negara (Wodak & Meyer, 2016). Penelitian ini memperlihatkan bahwa penghapusan narasi merupakan bagian dari strategi politik memori yang bekerja melalui bahasa, arsip, dan distribusi pengetahuan sejarah (Van Dijk, 2008). Kerangka konseptual yang dikembangkan juga membantu menjelaskan hubungan antara historiografi nasional dan pembentukan identitas kolektif masyarakat Indonesia (Assmann, 2011). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan metodologi kritis untuk membaca historiografi sebagai arena produksi kekuasaan dan memori sosial (Olick, 2007).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam historiografi Indonesia pada era Soekarno merupakan bagian dari praktik politik memori yang bekerja melalui mekanisme seleksi, representasi, dan eksklusi dalam sejarah resmi negara. Analisis wacana kritis memperlihatkan bahwa historiografi tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen ideologis untuk membangun identitas nasional dan legitimasi politik melalui kontrol terhadap memori kolektif. Penghapusan narasi dilakukan melalui strategi diskursif, dominasi arsip tertentu, dan institusionalisasi sejarah nasional yang menempatkan figur di luar orientasi nasionalisme dominan sebagai bagian yang tidak terlihat dalam sejarah resmi. Temuan ini menegaskan bahwa relasi antara historiografi, kekuasaan, dan ideologi memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan ingatan kolektif masyarakat Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa historiografi merupakan praktik diskursif yang berkaitan dengan relasi kuasa dan produksi makna dalam masyarakat pascakolonial. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan historiografi yang lebih kritis, inklusif, dan multidimensional dalam membaca sejarah nasional Indonesia agar praktik eksklusi memori tidak terus direproduksi dalam pendidikan, arsip, dan kebijakan budaya negara.

Daftar Pustaka

- Adam, A. W. (2019). *Membongkar manipulasi sejarah*. Kompas.
- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Anderson, B. R. O'G. (1990). *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Cornell University Press.
- Ankersmit, F. R. (2001). *Historical representation*. Stanford University Press.
- Assmann, J. (2011). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press.
- Assmann, J., & Czaplicka, J. (1995). Collective memory and cultural identity. *New German Critique*, 65, 125–133. <https://doi.org/10.2307/488538>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality*. Anchor Books.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Blackburn, S. (2020). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Budiawan. (2013). *Mematahkan pewarisan ingatan*. Ombak.
- Burke, P. (2015). *What is cultural history?* (3rd ed.). Polity Press.
- Chartier, R. (2007). *Inscription and erasure: Literature and written culture from the eleventh to the eighteenth century*. University of Pennsylvania Press.
- Chouliaraki, L., & Fairclough, N. (1999). *Discourse in late modernity: Rethinking critical discourse analysis*. Edinburgh University Press.
- Confino, A. (1997). Collective memory and cultural history: Problems of method. *The American Historical Review*, 102(5), 1386–1403. <https://doi.org/10.1086/ahr/102.5.1386>
- Connerton, P. (2008). Seven types of forgetting. *Memory Studies*, 1(1), 59–71. <https://doi.org/10.1177/1750698007083889>
- Cook, T., & Schwartz, J. M. (2002). Archives, records, and power. *Archival Science*, 2(1–2), 1–19. <https://doi.org/10.1007/BF02435628>
- Cribb, R. (2020). *Historical injustice and memory in Indonesia*. NUS Press.
- Eriyanto. (2011). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Kencana.
- Erl, A. (2011). *Memory in culture*. Palgrave Macmillan.
- Erl, A., & Rigney, A. (2009). *Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory*. De Gruyter.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fairclough, N. (2013). *Language and power*. Routledge.
- Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. In T. van Dijk (Ed.), *Discourse as social interaction* (pp. 258–284). Sage.
- Ferro, M. (2003). *The use and abuse of history: Or how the past is taught*. Routledge.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Gutman, Y., Brown, A., & Sodaro, A. (2010). *Memory and the future: Transnational politics, ethics and society*. Palgrave Macmillan.
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. University of Chicago Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE.
- Heryanto, A. (2006). *State terrorism and political identity in Indonesia: Fatally belonging*. Routledge.
- Hirsch, M. (2012). *The generation of postmemory*. Columbia University Press.
- Hutton, P. H. (1993). *History as an art of memory*. University Press of New England.
- Jørgensen, M., & Phillips, L. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. Sage.
- Kansteiner, W. (2002). Finding meaning in memory. *History and Theory*, 41(2), 179–197. <https://doi.org/10.1111/0018-2656.00198>
- LaCapra, D. (1998). *History and memory after Auschwitz*. Cornell University Press.
- Legge, J. D. (2003). *Sukarno: A political biography*. Equinox Publishing.
- Lindsay, J., & Liem, H. T. (2012). *Heirs to world culture: Being Indonesian 1950–1965*. KITLV Press.
- Mbembe, A. (2002). The power of the archive and its limits. In C. Hamilton et al. (Eds.), *Refiguring the archive* (pp. 19–27). Kluwer Academic Publishers.
- McGregor, K. E. (2007). *History in uniform: Military ideology and the construction of Indonesia's past*. NUS Press.

- Melvin, J. (2018). *The army and the Indonesian genocide: Mechanics of mass murder*. Routledge.
- Mills, S. (2004). *Discourse*. Routledge.
- Misztal, B. A. (2003). *Theories of social remembering*. Open University Press.
- Mrázek, R. (2010). *A certain age: Colonial Jakarta through the memories of its intellectuals*. Duke University Press.
- Nordholt, H. S. (2004). Decentralisation in Indonesia. *IAS Newsletter*, 33, 20–21.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2008). *Perspectives on Indonesian history*. KITLV Press.
- Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de mémoire. *Representations*, 26, 7–24. <https://doi.org/10.2307/2928520>
- Olick, J. K. (2007). *The politics of regret: On collective memory and historical responsibility*. Routledge.
- Olick, J. K., & Robbins, J. (1998). Social memory studies. *Annual Review of Sociology*, 24, 105–140. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.105>
- Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V., & Levy, D. (2011). *The collective memory reader*. Oxford University Press.
- Reid, A. (2015). *A history of Southeast Asia: Critical crossroads*. Wiley-Blackwell.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Ricoeur, P. (2004). *Memory, history, forgetting*. University of Chicago Press.
- Robinson, K. (2021). *Gender, Islam and democracy in Indonesia*. Routledge.
- Roosa, J. (2020). *Buried histories: The anticommunist massacres of 1965–1966 in Indonesia*. University of Wisconsin Press.
- Samuel, R. (2013). *Theatres of memory: Past and present in contemporary culture*. Verso.
- Shiraishi, T. (1997). *An age in motion: Popular radicalism in Java, 1912–1926*. Cornell University Press.
- Stoler, A. L. (2009). *Along the archival grain: Epistemic anxieties and colonial common sense*. Princeton University Press.
- Trouillot, M.-R. (1995). *Silencing the past: Power and the production of history*. Beacon Press.
- Trouillot, M.-R. (2015). *Silencing the past: Power and the production of history* (2nd ed.). Beacon Press.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse studies. *Discourse Studies*, 17(4), 466–485.
- Vansina, J. (1985). *Oral tradition as history*. University of Wisconsin Press.
- Vatikiotis, M. R. J. (1998). *Indonesian politics under Suharto*. Routledge.
- Vickers, A. (2005). *A history of modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- White, H. (1973). *Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe*. Johns Hopkins University Press.
- White, H. (2014). *The practical past*. Northwestern University Press.
- Wieringa, S. E. (2019). *The genocide in Indonesia and feminist politics*. Routledge.
- Wilson, I. D. (2022). *Politics and memory in Indonesia*. Routledge.
- Wodak, R. (2021). *The politics of fear*. SAGE.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Zurbuchen, M. S. (2005). Beginning to remember: The past in the Indonesian present. *Asian Survey*, 42(4), 564–581. <https://doi.org/10.1525/as.2002.42.4.564>